ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMBANG

(Study Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)

SKRIPSI

Nama : Lismawati

NIM : 222014060

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2019

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

Study padaBadanPengelolaanKeuangandanAset Daerah kotapalembang

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyarat
Memperolah Gelar Sarjana Ekonomi

Nama: Lismawati
NIM :222014060

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lismawati

NIM : 222014060

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tdak benar maka, saya sanggup menerima sanksi dengan peraturan yang ada.

Palembang, Januari 2019

Penulis

METERAI TEMPEL

D501EAFF848687907

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Lismawati

NIM.222014060

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang
Nama	: Lismawati
NIM	: 222014060
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Kosentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Sunardi, S.E.,M.Si	**Lis Djuniar, S.E.,M.Si**
NIDN/NBM : 0206046378/784021	NIDN/NBM : 0220067101/1115716

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri, S.E., M.Si., Ak.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PRAKATA

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarokatu

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, berkat rahmat-nya penulis dapat menyelsaikan skripsi ini yang berjudul **''Analisis Penerimaan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.''** skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku Bapak Salim dan Ibu Sukini yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada bapak Sunardi, Drs, S.E, M.Si dan Ibu Lis Djuniar S.E, M.Si yang telah membimbing dan selalu memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus, ikhlas dan bermanfaat dalam menyelsaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelsaikan studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr.H.Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E,AK.,M.Si.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Bapak Nina Sabrina S.E M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Darma Yanti selaku Pembimbung Akademik.
5. Bapak dan ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah memberikan izin saya untuk meneliti dan pengambilan data.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian, akhirulkalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapatkan balasan dari Allah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masi banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatu

Palembang ,Januari 2019

Penulis

Lismawati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER i
HALAMAN JUDUL..... ii
HALAMAN PERYATAAN BEBAS PLAGIAT iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v
HALAMAN PRAKATA vi
HALAMAN DAFTAR ISI ix
HALAMAN DAFTAR TABEL xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR..... xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT..... xvii

BAB I PENDAHULULUAN

A. Latar Belakang Masalah 01

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Manfaat Penelitian..... 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 11

1. Pendapatan Asli Daerah..... 11
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 12
3. Teori Pendapatan Daerah..... 14
4. Teori Target Pendapatan.....16
5. Pajak Reklame.....17
6. Ketentuan Umum.....19
7. Subjek dan Objek Pajak Reklame.....20
8. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Reklame.....21
9. Besarnya Pokok Pajak Reklame.....22

10. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....22

11. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....24

12. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.....25

13. Ketentuan Umum Ekstensifikasi pajak.....26

14. Perencanaan Ekstensifikasi pajak.....27

15. Intensifikasi Pajak 29

B. PenelitianSebelumnya 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 36

B. Lokasi Penelitian 37

C. Operasional Variabel 37

D. Data yang Diperlukan 38

E. Metode Pengumpulan Data 38

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 41

1. Sejarah singkat BPKAD.....41

2. Visi.....42

3. Misi.....42

4. Tujuan BPKAD.....43

5. Rencana Kerja.....43

6. Struktur BPKAD.....44

B. Pembahasan Hasil Penelitian..... ..48

1. Perhitungan Tingkat efektivitas.....46

2. Perhitungan tingkat laju pertumbuhan.....49

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan..... ..63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Selesai Riset Dari Kecamatan

Lampiran 2 Jadwal Kegiatan Penelitian

Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur`an

Lampiran 5 Sertifikat Toefl

Lampiran 6 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 7 Biodata Penulis

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Realisasi Penerimaan dan Target Penerimaan Reklame 9
Tabel I.2 Indikator Pemungutan Efektivitas Pajak Reklame 24
Tabel I.3 Persaamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya 35
Tabel II.1 Operasional Variabel 37
Tabel II.2 Efektivitas Pajak Reklame..... 46
Tabel IV.1 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame 47
Tabel IV.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 48
Tabel IV.3 Grafik Target dan Realisasi Pajak Reklame..... 48
Tabel IV.4 Efektivitas Pajak Reklame..... 53

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 44
Gambar IV.2 Grafik Target Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 48

ABSTRAK

Nama: Lismawati / 222014060 / 2019 / Analisis Penerimaan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang. Rumusan masalah dalam yaitu bagaimanakah penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Variabel dalam penelitian ini yaitu Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai reklame selama 3 tahun tingkat efektifitasnya sangat rendah hal ini dibuktikan pada nilai laju pertumbuhan pajak reklame Kota Palembang yang mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016.

Kata kunci: pajak reklame, pendapatan asli daerah.

Abstract

Lismawati / 222014060 / 2019 / The Analysis of Advertisement Tax Revenue in Increasing the Local Own-Source Revenue of Palembang City.

The objectives of this study was to find out the advertisement tax revenue in increasing the local own-source revenue of Palembang City. The problem of the study was how the advertisement tax revenue could increase the local own-source revenue of Palembang City. Qualitative research was employed in this study. This study took place in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah city of Palembang. The variables in this study were advertisement tax and Local Own-Source Revenue. This study used primary and secondary data. The data was analyzed by using interview and documentation. The result of the study showed that there was no significant effectiveness of advertisement during 3 years. This result was proved by the growth rate of advertisement tax in Palembang which increased in 2015 and degraded in 2016.

Keywords: Advertisement Tax, Local Own-Source Revenue

PENGESAHAN
NO. 136 /Abstract/LB/UMP/ 11 / 2019
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara (UU No 17 Tahun 2003). Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di negara indonesia. Hal ini dapat dilihat pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya.Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak perlu mendapatkan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh.Pemerintah dalam hal ini perlu pengawasan agar tidak terjadi kebocoran dalam pungutannya.Semua itu dapat terlaksana dengan adanya partisipasi dari semua pihak selain dari pihak yang berwenang dalam pengawasan pajak juga dari masyarakat itu sendiri agar pajak tersebut dapat dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada penyelewengan di dalam pembayaran pajak tersebut, agar tercipta kecepatan pembangunan daerah tersebut.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunaan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001.Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Dari berbagai alternatif penerimaan Daerah, Undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari dalam Daerah itu sendiri. Sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan.Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.Salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan efesiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Dimana pajak reklame termasuk sumber pajak daerah yang

potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah serta hasil pajaknya cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak reklame berperan penting dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota palembang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunaan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001, dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah.Undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah bersumber dari dalam daerah itu sendiri. pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Kabupaten Minahasa Utara yang sangat potensial.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Berbagai macam jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah.Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerah pun meningkat, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat.Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebihrendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil.

Menutut Baldric (2017: 32)Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayanya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Wulandari (2017: 23) pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Didalam Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Hulu, 2012)

Pajak reklame diterapkan di negara berkembang dan negara maju, ini menunjukkan bahwa pajak tetap dibutuhkan untuk menjadi sumber pembiayaan pembangunan meskipun tingkat perekonomian pada suatu negara sudah tinggi.Pajak reklame diterapkan di tiap negara dengan

peraturan yang berbeda sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Di Amerika Serikat, khususnya pada Kota Phoenix (City of Phoenix) pajak reklame merupakan bagian dari pajak penjualan. Pemerintah Kota Phoenix mengenakan pajak reklame dengan tarif 0,5%, sementara negara bagian tidak mengenakan pajak atas reklame. Untuk billboard dikenakan pajak berdasarkan lokasi pemasangan billboard.

Di Ukraina, pajak reklame merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah lokal. Pajak reklame dikenakan ke pihak yang menempatkan reklame Analisa upaya. Anita Yulianti, FE UI, 2010. Universitas Indonesia 24 atau iklan di media massa, di luar ruangan atau di media lainnya. Maksimal tarif pajak reklame yang dikenakan ialan 0,5% dari biaya jasa reklame. Agen iklan atau pihak yang menempatkan reklame wajib mengumpulkan dan menyetor pajak.

Kota Bitung merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Sulawesi Utara dan memiliki fasilitas penunjang yang menjadikannya sebagai jalur perdagangan laut yaitu dengan adanya Pelabuhan Bitung.Fasilitas inilah yang menunjang lancarnya jalur perdagangan sehingga industri di kota Bitung semakin hari semakin meningkat.

Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak,media elektronik,juga semakin marak dibutuhkan. Lahirnya media

baik cetak maupun elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran lewat media reklame.Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif. Reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bias diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu potensi dan perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah.

Menurut Baldric (2017: 176), pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Bentuk-bentuk reklame yang dikenai pajak meliputi papan, billboard, videotron, megatron, kain, stiker, selegram, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film atau slide, dan reklame peranggaan. Pajak reklame termasuk pungutan daerah kabupaten atau kota.

Menurut Wulandari (2017: 61) yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

Penelitian pertama dilakukan oleh Rezlyanti (2016) Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah

efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Triski dan Kawan-kawan (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame tahun 2011, 2012 dan 2013 mendapat kategori “Sangat Efektif”, sedangkan tahun 2014 dengan kategori “Efektif”. Berdasarkan perhitungan data historis, potensi penerimaan Pajak Reklame Kota Bitung pada tahun 2015 adalah sebesarRp 91.376.453.510.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arin (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern sistem pemungutan pajak reklame di BPPKAD Kabupaten Temanggung telah berjalan efektif dan telah dijalankan sesuai dengan rancangan komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Pada komponen kegiatan pengendalian yaitu pemisahan tugas, masih terdapat rangkap jabatan.Untuk mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang sebaiknya BPPKAD Kabupaten Temanggung melakukan penambahan pegawai.

Kesimpulan dari ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame sudah efektif dan pada penelitian yang dilakukan oleh Arin dan Siti menunjukkan hasil pengendalian intern pajak reklame berjalan efektif, tetapi pada kegiatan pengendalian yaitu pemisahan tugas

masih terdapat rengkap jabatan ini dilakukan untuk mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang.

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan Dan Target Penerimaan Pajak Reklame di Kota Palembang Tahun 2015-2017

No	Tahun	Realisasi penerimaan	Target penerimaan	Persentase
1	2015	15.318.876.909.00	14.890.000.000	102,88%
2	2016	16.567.211.469.38	15.604.719.571	106,17%
3	2017	18.113.700.816.80	17.605.000.000	102,89%

Sumber: www.djpk.go.id.

Tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Palembang dari tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami peningkatan, pajak reklame cenderung mengalami kenaikan signifikan dari target dan jumlah penerimaannya yang ditetapkan dari tahun 2015 tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Adanya peningkatan pajak reklame disuatu daerah semestinya berjalan seiring dengan tingkat pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian diatas, untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah"**

B. Rumusan masalah

Bagaimanakah penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palembang.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

   Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ilmu perpajakan tentang efektifitas dan kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

   Penulis berharap dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan yang berhubungan dengan upaya meningkatkan pajak daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang, terutama pada sektor Pajak Reklame.

3. Bagi Almamater

   Dapat dijadikan sebagai sarana informasi dan referensi selanjutnya bagi para peneliti yang tertarik pada bidang perpajakan, terutama mengenai Pajak Reklame.

DAFTAR PUSTAKA

Arin Nuraeni, Siti Mutmainah (2018*). pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak reklame pada badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah(BPPKAD) kabupaten temanggung. 1(2*)

Baldric Silegar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
dikota bitung. 15(4)

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*

Rezlyanti Kobandaha (2016). *Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota mobagu.*

Rudy Badrudin. 2017. Ekonomika Otonomi Daerah. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Triski, DKK(2015). *Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak reklame*

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. *Tentang Penerimaan Negara*

Undang-Undang Dasar 1994. *Tentang Kemakmuran Masyarakat Didalam Sila Pancasila*

Undang-Undang No.23 Tahun 2014. *Tentang Otonomi Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. Metode *Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Catak Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

V.Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Ceta Pertama. PT. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Wulandari, Iryanie. 2017. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Cetak Pertama. CV BUDI UTAMA. Yogyakarta.